



PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Addiarrahman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaba Saifuddin Jambi
e-mail: addiarrahman@uinjambi.ac.id

Diterima: 12 Mei 2018

Direvisi: 1 Juni 2018

Diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract

This article aims to elaborate the paradigm of regional development planning in the perspective of Islamic economics. The need for new perspectives in formulating development planning is quite significant considering the weaknesses and failures of the conventional paradigm which has been the background. The worldview proposed through this paper integrates Islamic values (al-Quran and al-Sunnah) as meta-framework and archetypal models; development goals as contained in the 1945 Constitution and other regulations; local wisdom in each region.

Keywords: *paradigm, regional development planning, maqasid al-syaria*

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengelaborasi paradigma perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif ekonomi Islam. Kebutuhan terhadap perspektif baru dalam merumuskan perencanaan pembangunan cukup penting mengingat kelemahan dan kegagalan paradigma konvensional yang selama ini melatarinya. Paradigma yang diusul melalui tulisan ini mengintegrasikan: nilai-nilai Islam (al-Quran dan al-Sunnah) sebagai *metaframework* dan *archetypal model*; tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya; kearifan lokal yang terdapat di masing-masing daerah.

Kata Kunci: Paradigma, Perencanaan Pembangunan Daerah, *Maqashid Syariah*

Latar Belakang

Pemerataan kesejahteraan merupakan persoalan pokok yang dihadapi hampir di seluruh negara berkembang (*development countries*). Negara dituntut membuat inisiatif-inisiatif yang berdampak pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya jarak antara kelompok kaya dan miskin. Inisiatif-inisiatif tersebut, tentunya dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Apakah, misalnya, menerapkan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, atau sistem ekonomi pasar (neoliberalisme). Pilihan sistem ekonomi ini, akan tampak pada perencanaan

pembangunan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Mohammad Hatta bahwa tujuan dari perencanaan ekonomi adalah agar mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat.¹

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah memulai agenda pembangunan ekonomi dengan menggunakan beberapa sistem yang ada. Pada titik ini, Indonesia juga terjebak dalam lingkaran dominasi dan hegemoni

¹ Mohammad Hatta, *Ekonomi Berentjana*, (Jakarta : Gunung Agung, 1971), hal., 7-8



asing, seperti Amerika dan Cina.² Keyakinan yang berlebihan terhadap teori ekonomi negara maju, menyebabkan ketergantungan dan keterbelakangan tersebut terus terjadi. Sritua Arief dengan tegas mengingatkan pentingnya merumuskan konsep ekonomi pembangunan yang berakar pada jati diri bangsa Indonesia.³

Pernyataan Sritua Arief menunjukkan terdapat persoalan pokok yang menjadi penyebab tidak Bergeraknya pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk memahaminya, perlu upaya melampaui pemahaman umum tentang pembangunan yang diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Politik angka PDB telah menyita perhatian banyak negara, sehingga bukan hanya ketimpangan sosial dan ekonomi, akhir-akhir ini kerusakan lingkungan, perubahan iklim, krisis pangan, menjadi realitas yang dihasilkan angka tersebut.⁴ Thomas Piketty menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah jaminan pemerataan kesejahteraan telah terjadi. Sebaliknya, nilai pertumbuhan ekonomi suatu negara (*economic growth* = g) yang lebih kecil dari pada *rate of return* atau tingkat keuntungan yang diperoleh investasi modal ($r > g$), menunjukkan tingginya angka kesenjangan. Artinya, konsentrasi kekayaan terpusat pada pemilik modal atau golongan elit ekonomi, atau dengan kata lain kapitalisme semakin

tumbuh subur.⁵ Oleh sebab itu, alternatif lain untuk memahami masalah utama dalam pembangunan adalah dengan memeriksa kembali paradigma pembangunan yang digunakan.

Paradigma Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Dalam rentang sejarah Indonesia, beberapa sistem ekonomi yang dilatari oleh paradigma atau ideologi tertentu pernah diterapkan. Pada masa pemerintahan orde lama, Indonesia menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang dipengaruhi oleh ideologi sosialisme-komunisme. Perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen “Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia, Plan Produksi Tiga Tahun Republik Indonesia 1948-1950, Rencana Urgensi untuk Perkembangan Industri 1951-1952, Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, Rencana Pembangunan Nasional Semesta 1961-1969.” Akan tetapi, ketidakstabilan politik pada masa orde baru membuat target perencanaan pembangunan tersebut tidak terealisasi dengan baik. Berbeda dengan pemerintahan orde baru yang dengan kestabilan politik, mampu merumuskan perencanaan pembangunan ekonomi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I s.d VI. Selanjutnya, perencanaan pembangunan mengalami perubahan yang sangat signifikan pada era reformasi yang ditandai dengan lahirnya UU otonomi daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak lagi terpusat (sentralisasi), melainkan daerah diberikan wewenang membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi dan

² Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca dalam: Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia, 2000);

³ Sritua Arief & Adi Sasono, *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*, edisi revisi, (Jakarta : Mizan, 2013)

⁴ Lorenzo Fioramonti, *Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi*. terj. (Jakarta: Margin Kiri, 2017).

⁵ Lihat: Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, translated by A.Goldhamer, (Cambridge : Harvard University Press, 2014)



permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah (desentralisasi).⁶

Tabel A.1. Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Era Perencanaan Pembangunan	Paradigma Pembangunan	Arah Pembangunan	Tahun	Manipol-Usdek-Nasakom, yang beranjak dari pemahaman “revolusi belum selesai” yang dioperasionalkan melalui demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, sosialisme Indonesia, dan kegotongroyongan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme)	Membangun kegotongroyongan nasional dan tata perekonomian nasional yang mandiri dan tidak bergantung pada pasang surut pasar dunia, penegakkan kepribadian dan kebudayaan Indonesia dengan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kesadaran hidup menuju “masyarakat sosialis Indonesia” seperti yang dicita-citakan Bung Karno	0,8
ORDE LAMA / SENTRALISASI	Kolektivisme dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, peningkatan kemampuan individu dan masyarakat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.	Mempertahankan kemerdekaan, mewujudkan kedaulatan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terwujudnya kesejahteraan rakyat secara merata di seluruh Nusantara	1945-1949	1960-1965 UUD 1945 Kembali ke UUD 1945 melalui Dekrti Presiden 5 Juli 1959		
	Independensi dan anti-independensi dengan pola pikir kebebasan berserikat dan berkumpul. Perencanaan pembangunan dipengaruhi sistem ekonomi politik yang berlandaskan nasionalisme	Mewujudkan kedaulatan dan keutuhan NKRI serta kesejahteraan rakyat, mengembangkan kehidupan demokrasi dari perekonomian nasional berdasarkan pasal 38 UUD 1950	1950-1959			
ORDE BARU / SENTRALISASI			1966-1998	Paradigma konstitusional , yang diwujudkan dalam semangat trilogi pembangunan : pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, disertai	Pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam perspektif 25 tahunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, maju, mandiri, dan sejahtera. Terarah pada terwujudnya keselarasan,	5,4
			1945			

⁶ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal., 8-11



	peningkatan kualitas SDM, pembangunan manusia, dan pembangunan yang berkelanjutan.	keserasian, dan keseimbangan antara kemajua lahiriah dan batiniah			Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Menjadi bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan HAM. Perekonomian yang mendorong peningkatan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak. Peningkatan kesejahteraan, penumbuhan demokrasi, dan keadilan sejati bagi rakyat.
1998-2004	Paradigma Reformasi, yaitu dengan reformasi total secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Mewujudkan desentralisasi nilai dan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Stabilitas moneter, kedaulatan rakyat, penegakkan hukum, peletakan kerangka dasar dan agenda reformasi pembangunan agama, sosial budaya dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, mandiri, damai dan sejahtera	ERA REFORMASI / DESENTRALISASI	2004-2015 UUD 1945 Hasil Amandemen, Pemilihan Umum Secara Langsung	Kabinet Indonesia Bersatu I : <i>Pro growth, pro poor, dan pro jobs.</i> Kabinet Indonesia Bersatu II : Pembangunan yang seimbang, inklusif, dan kreatif menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.
Proses Amandemen, Legitimasi Substitusi GBHN, dan Pelembagaan SPPN				Sumber : Mustopadidjaja, dkk. <i>Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025</i> , (Jakarta : LP3ES, 2012), hal., 468-484, data diolah.	

Sebagai negara yang baru merdeka, perekonomian Indonesia pada lima tahun pertama (1945-1950) bisa disebut sebagai “ekonomi perang” yang menyerupai “ekonomi deparasi.”⁷ Perekonomian bergerak berdasarkan paradigma liberalisasi yang merupakan warisan penjajah Hindia-Belanda. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi lebih terkonsentrasi pada upaya

⁷ M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Pascamodernis Esai-esai Ekonomi Politik*, (Yogyakarta : Insist Press, 2012), hal., 22



mengubah “ekonomi Belanda” yang dualistik menjadi “ekonomi Indonesia” melalui program nasionalisasi.⁸ Kemudian, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia mengalami pergeseran ke arah sosialisme. Soekarno dengan semangat “politik sebagai panglima” lewat ideologi Nasakom yang berujung terbentuknya perekonomian Indonesia yang tidak produktif dan efisien, serta dilanda inflasi tiga digit.⁹

Terpuruknya ekonomi Indonesia pada masa ekonomi terpimpin, mendorong pemerintah orde baru lebih terbuka dengan semangat industrialisasi. Perencanaan pembangunan pada saat itu bertolak pada paradigma demokrasi ekonomi, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Akan tetapi, Indonesia belum sepenuhnya lepas dari dualisme sosio-ekonomi yang membentuk paradigma pembangunan (*developmentalism*). Teori-teori pembangunan seperti modernisasi, dependensi, menjebak pembangunan ekonomi Indonesia pada upaya eksploitasi sumber daya alam.¹⁰ Akibatnya, tahun 1983 menjadi awal era liberalisasi yang lebih berorientasi ke pasar. Fenomena ini terus berlanjut dengan adanya desakan agenda neo-liberal sebagaimana tampak setelah reformasi.¹¹

⁸ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1988), hal., 3

⁹ M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Pascamodernis...*, hal., 25

¹⁰ Mansur Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)

¹¹ Sistem ekonomi neo-liberal menurut Amin Rais merupakan agenda *neo imperialism* yang mengarah pada penjajahan mental dan pemikiran. Sasarannya tak lain adalah menguasai sumber daya ekonomi melalui penekanan pada kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Baca: Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!*, (Yogyakarta : PPSK, 2008). Lihat juga: Awalil Rizky & Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkram Indonesia*, (Jakarta : E. Publishing, 2008), hal., 22, baca juga: Erhard Eppler, *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal*, terj.

Reformasi politik yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, menjadi awal pergeseran paradigma pembangunan yang bercorak sentralistik menjadi desentralistik. Keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi dasar hukum berlakunya sistem otonomi daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran sentralisasi menjadi desentralisasi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Otonomi daerah memberikan peluang besar kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan sumber daya, karakter, dan budaya masing-masing daerah. Isran Noor menegaskan “otonomi daerah telah memperkokoh sendi-sendi perekonomian daerah dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur yang menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal (*local economic growth*) serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.”¹²

Hasil kajian empiris membuktikan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah, terutama setelah tahun 2001.¹³ Hasil

(Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009); David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, (New York : Oxford University Press, 2005), hal., 2

¹² Isran Noor, *Politik Ekonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*, (Jakarta : Seven Strategic Studies, 2012), hal., 12

¹³ Lihat hasil penelitian: Puji Wiboyo, “Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2008, hal., 55-83; Hadi Sasana, “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah,” *Dinamika Pembangunan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2006, hal., 145-170; Abd. Ghafar B. Ismail dan Muhammad Zilal Hamzah, “Fiscal Decentralization and Economic Growth Nexus :Evidence from Province-Level Cross-Section Data for Indonesia,” *Review of Islamic Economics*, Vol. 10, No. 2, 2006, hal., 133-152



temuan ini memberikan harapan bagi terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang pada masa orde baru, agenda lepas landas berhadapan dengan adanya kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, terlebih dengan daerah bagian timur.¹⁴ Dengan kata lain, sentralisasi menyebabkan perusahaan dan industri cenderung memilih lokasi mendekati pusat kekuasaan dan pemerintahan. Penelitian membuktikan bahwa pulau Jawa dan Sumatera menyerap sekitar 90% aktivitas bisnis Indonesia selama 1976-1999.¹⁵

Grafik 1. Rasio Gini Indonesia



Sumber: Megwati Institute, *Hasil Riset Oligarki Ekonomi*, hal. 4

Penyelenggaraan otonomi daerah, secara kontras, berdampak terhadap peningkatan rasio gini Indonesia yang terus meningkat. Pada saat yang sama, penguasaan asset terkonsentrasi oleh rumah tangga terkaya. *Oxfam Briefing Paper*

melaporkan bahwa 1% penduduk terkaya Indonesia menguasai 49% total kekayaan.¹⁶ Hasil penelitian Megawati Institute tentang Oligarki Ekonomi, juga menunjukkan hal yang sama. Laju pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya Indonesia 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2006 sampai 2016.¹⁷

Peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah pada dasarnya membuka ruang pengembangan sistem pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi geografi, sosial dan budaya Indonesia. Diskursus sistem ekonomi Pancasila adalah yang paling banyak menarik perhatian; baik dari akademisi, praktisi maupun elit politik. Lebih dari itu, ia telah menimbulkan polemik paling besar dalam kajian ilmu sosial di sepanjang sejarah Indonesia.¹⁸ Kondisi ini sangat wajar karena Pancasila merupakan pandangan hidup (*worldview*) bangsa Indonesia; yang bertentangan dengan ideologi lainnya, seperti komunisme dan kapitalisme. Di sisi lain, ide-ide yang dikembangkan dalam sistem ekonomi Pancasila menuai banyak kritik. William Liddle, misalnya, menilai bahwa karya-karya akademik tentang Ekonomi Pancasila kebanyakan terlalu mengeksplorasi tema-tema umum, namun sangat singkat dalam merumuskan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang spesifik. Masih dalam penilaian Liddle, inilah yang menjadi kelemahan pemikiran ilmu sosial di Indonesia. Terlalu banyak isu-isu yang dikembangkan bagaikan komet di langit; mengulangi isu yang sama, namun tidak

¹⁴ Mayling Oey dan Peter Gardiner, "Lepas Landas Ekonomi dan Kesenjangan Regional: Pembangunan di Luar Jawa," *Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*, Nomor 3, Tahun 1990, hal., 3-13

¹⁵ Mudrajad Kuncoro, "Desentralisasi Sekedar Alat," pengantar buku Jamil Gunawan, dkk. (ed), *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta : LP3ES, 2004), hal., xxii

¹⁶ Oxfam Briefing Paper, *Toward a More Equal Indonesia: How the Government Can Take Action to Close the Gap between the Richest and the Rest*. Februari 2017

¹⁷ Megawati Institute, *Hasil Riset Oligarki Ekonomi* (slide), Jakarta, 27 Desember 2017

¹⁸ Tarli Nugroho, *Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan 1965-1985*, (Yogyakarta : Mubyarto Institute, 2016)



pernah menemui titik penyelesaian.¹⁹ Kritik senada juga dilontarkan oleh Peter McCawley. Menurutnya, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sistem ekonomi Pancasila diimplementasikan. Untuk itu, McCawley menyarankan agar ekonom Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap analisis konkrit mengenai isu-isu kebijakan ekonomi Indonesia.²⁰

Selain ekonomi Pancasila, sistem ekonomi Islam juga bisa menjadi solusi alternatif. Sejak tumbuh dan berkembangnya perbankan Syariah di Indonesia, dimulai pada tahun 1991, gagasan pengembangan sistem ekonomi Islam terus berkembang; baik secara teori maupun praktik. Akan tetapi, hingga saat ini *market share* perbankan syariah masih di bawah 5%.²¹ Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,²² dan juga di beberapa negara GCC dan Asia Timur.²³ Selain lembaga keuangan syariah,

peningkatan pengelolaan zakat juga menunjukkan tren positif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Studi membuktikan bahwa pengelolaan zakat di beberapa negara berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan.²⁴ Oleh sebab itu, perspektif ekonomi Islam pada dasarnya dapat dikembangkan sebagai tawaran alternatif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.

Paradigma Islam dalam Perencanaan Pembangunan

Pembahasan pada bagian ini menyajikan peta konsep (*frame work*) yang bisa dijadikan landasan atau kerangka berfikir untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam bagaimana kerangka ekonomi Islam dalam membuat perencanaan pembangunan. Teori yang digunakan adalah teori *metaframework* dan teori *archetypal model* sebagaimana dikembangkan oleh Abbas Mirakhor dan Hossein Askari.

Sumber utama yang menjadi acuan bagi pembentukan sistem perencanaan pembangunan adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagai kerangka dasar, al-Qur'an menyediakan apa yang disebut Abbas Mirakhor dan Hossein Askari sebagai "*Metaframework*". Sedangkan al-Sunnah merupakan *the ultimate frame of reference* untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam *metaframework*, atau disebut sebagai *Archetypal Model*. Aspek penting dari

¹⁹ R. William Liddle, "The Politics of Ekonomi Pancasila: Some Reflections on a Recent Debate," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 18, no. 1 (Maret 1982): 96–101, <https://doi.org/10.1080/00074918212331334130>.

²⁰ Peter McCawley, "The Economics of Ekonomi Pancasila," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 18, no. 1 (1 Maret 1982): 102–9, <https://doi.org/10.1080/00074918212331334140>.

²¹ OJK, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, (Jakarta: OJK, 2017)

²² Muhamad Abduh dan Mohd Azmi Omar, "Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 1 (30 Maret 2012): 35–47, <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>. lihat juga: M. Putra Rizki & Fakhrudin, "Intermediasi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2015

²³ Rosylin Mohd. Yusof dan Mejda Bahlous, "Islamic banking and economic growth in GCC & East Asia countries: A panel cointegration analysis," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 4, no. 2 (23

September 2013): 151–72, <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2012-0044>.

²⁴ Salman Ahmed Shaikh, "Zakat Collectible in OIC Countries for Poverty Alleviation: A Primer on Empirical Estimation," *INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT* 1, no. 1 (22 November 2016): 17–35.

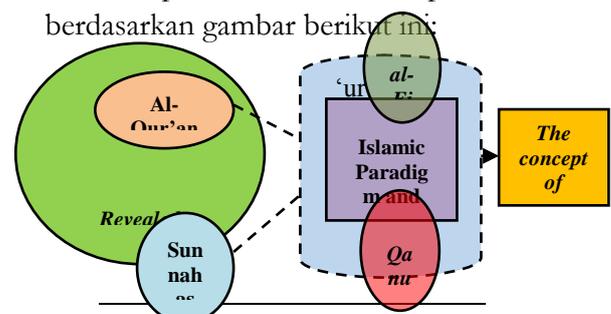
archetypal model adalah sifat operasionalnya.²⁵ Artinya, *metaframework* berfungsi sebagai landasan yang membentuk paradigma, sedangkan *archetypal model* menjadi *guidance* untuk membentuk perencanaan pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam.

Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pokok seluruh ajaran Islam adalah untuk rahmat bagi alam semesta. *Islam rahmatan lil 'alamin* menjadi *metaframework* bahwa tujuan pokok (*the ultimate goal*) pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam adalah rahmat (kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kebaikan nyata) bagi seluruh alam semesta (manusia, tumbuhan, hewan, lingkungan hidup, udara dan lainnya). Adapun cara untuk merealisasikannya adalah dengan meningkatkan *falab* atau kebaikan nyata (*real well-being*) bagi seluruh manusia di bumi, tanpa melihat suku, warna kulit, usia, jenis kelamin, atau pun negaranya.²⁶

Dengan demikian, apa yang tersaji dalam *metaframework* dan *archetypal model* bersifat prinsip-prinsip umum pada satu sisi, dan merupakan *general concept* yang menjadi rujukan bagi pembentukan sistem perencanaan pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam. Pada tahap selanjutnya, baik al-Qur'an dan al-Sunnah memberikan peluang interpretasi bagi manusia untuk mengoperasionalkan *general principle and general concept of development planning* tersebut berdasarkan kondisi, situasi, adat, budaya dan dengan

mempertimbangkan kekhususan masalah yang dihadapi suatu negara di mana mereka hidup menikmati sumber daya alam yang dikaruniai oleh Allah swt. Secara metodologis, karakter ini terumuskan dalam kaidah *la yunkir taghaiyir al-abkam bi taghaiyir al-zaman wa al-amkina, wa al-adab* (tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum susai dengan perubahan zaman, tempat, dan kebiasaan di mana hukum tersebut diberlakukan).

Pada titik ini, maka dalam membentuk perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif ekonomi Islam sangat penting memahami dan mendalami konsep pembangunan sebagaimana tertuang dalam UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Langkah ini, menurut Umar Chapra sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk memperkenalkan langkah-langkah Islami yang lebih spesifik.²⁷ Mengikuti Jasser Auda, al-Qur'an dan al-Sunnah dalam konteks pembentukan sistem perencanaan pembangunan dapat dipahami sebagai sistem kesadaran atau *expressions of human cognition of the revealed*,²⁸ untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk rencana aksi yang melahirkan langkah implementatif perencanaan pembangunan daerah. Lebih jelas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan gambar berikut ini:



²⁵ Abbas Mirakhor dan Hossein Askari, *Islam and the Path to Human and Economic Development*, (New York : Palgrave Macmillan, 2010), hal., 56

²⁶ Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*...hal., 1. Karakter umum dari konsep pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam ini mirip dengan arah dan tujuan dari gagasan pembangunan inklusif sebagaimana dapat dibaca dalam A Prasetyantoko, dkk., *Pembangunan Inklusif*...

²⁷ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, terj. (Jakarta : Shariah Economics and Banking Institute, 2001), hal., 377

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, (London : IIIT, 2007), hal., 194-196

**Bagan 1.**

Paradigma Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Ekonomi Islam

Kerangka di atas masih terbatas pada pokok pengembangan paradigma yang diarahkan untuk membangun konsep implementatif bagi perencanaan pembangunan daerah. Persoalannya kemudian adalah teori apakah yang dapat dijadikan acuan bagi kerangka pemikiran tersebut. Cukup sulit menemukan teori pembangunan yang dikembangkan berdasarkan visi ekonomi Islam. Satu di antara penyebabnya adalah karena konsentrasi para akademisi maupun praktisi terfokus pada pengembangan institusi keuangan syari'ah. Namun, apa yang dikembangkan Islamic Relief Worldwide sebuah organisasi nirlaba di United Kingdom adalah pengecualiannya. Islamic Relief mengembangkan program pembangunan untuk perubahan mendasar yang disebut sebagai “*Integrated Sustainable Development Theory of Change*.” Berdasarkan teori ini, berbagai program perencanaan pembangunan telah dilaksanakannya di beberapa kawasan, seperti Pakistan, Mali, Bangladesh, Sudan, Kashmir, dan lainnya.²⁹

Teori ini berangkat dari tesis bahwa “*Islam provides a holistic understanding of human development anchored on the maqasid or agreed upon objectives of sharia.*” Pembangunan manusia, oleh sebab itu, merupakan proses mengatur tujuan manusia untuk mencapai kesejahteraan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi (baik material, non material, maupun spiritual). *Maqasid Syari'ah* mengarahkan bahwa pembangunan harus melingkupi dimensi agama (*din*), jiwa (*nafs*),

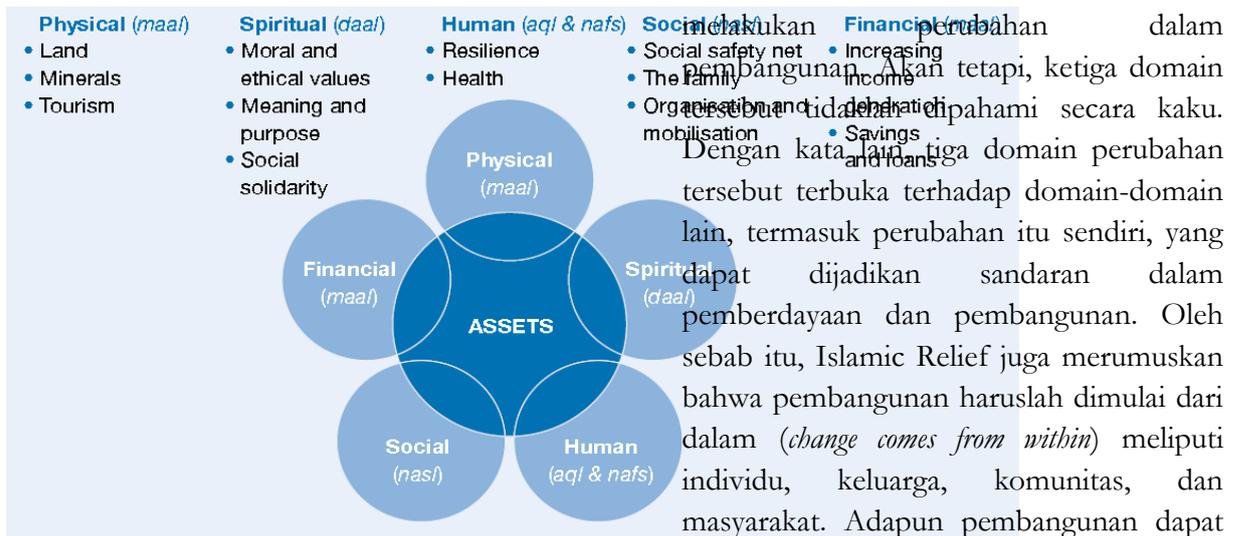
akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*) yang lazim disebut *dharuriyah al-khamsah*. Realisasinya haruslah dengan menarik hubungan vertikal antara manusia dengan pencipta dan hubungan horizontal antara sesama manusia dan dengan ciptaan lainnya.³⁰

Berdasarkan kelima aspek pokok kebutuhan manusia tersebut, Islamic Relief merumuskan bahwa ada tiga domain yang menjadi titik sentral untuk melakukan perubahan dalam pembangunan manusia, yaitu domain *assets*, *resilience to shocks*, dan *structural factor*. Ketiga domain tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Domain *assets* tidak hanya berkaitan dengan pencapaian material, melainkan termasuk aspek spiritualitas, solidaritas sosial, dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam *dharuriyah al-khamsah*. Hanya saja, konsep *maal* dibedakan antara harta dalam pengertian fisik dengan keuangan. Lebih lanjut dapat diperhatikan pada dua gambar berikut:

Gambar E.2 Domains of Change

²⁹ Islamic Relief Worldwide, *Introducing Islamic Relief Worldwide's Integrated Sustainable Development Programme*, (United Kingdom : Islamic Relief, 2014), hal., 2

³⁰ *Ibid.*



Domain perubahan kedua berkaitan dengan penyebab struktural dari kemiskinan, seperti pemerintahan yang korup, pelanggaran hak dan keadilan, infrastruktur yang buruk serta struktur pasar yang tidak berpihak pada kelompok miskin. Masalah-masalah struktural acap kali menjadi penghalang bagi terwujudnya pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Di sini, program pembangunan diarahkan pada upaya membangun kesadaran masyarakat dalam menegakkan hak-hak dan keadilan sosial. Misalnya, *Integrated Sustainable Development* yang dikembangkan di Mali berupaya mengangkat isu perempuan yang seringkali diabaikan bila dibandingkan dengan isu-isu umum lainnya, seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.³¹

Adapun domain *resilience to shocks* berhubungan dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman perubahan, termasuk perlindungan dari bencana alam, seperti kelangkaan pangan, konflik, dan seluruh faktor yang menyebabkan kemiskinan dan penderitaan. Proses analisis dari hubungan antara ketiga domain ini disebut dengan “*the opportunity analysis*” yang tujuannya adalah mencari dan menemukan langkah fundamental untuk

melakukan pembangunan. Akan tetapi, ketiga domain tersebut tidak dipahami secara kaku. Dengan kata lain, tiga domain perubahan tersebut terbuka terhadap domain-domain lain, termasuk perubahan itu sendiri, yang dapat dijadikan sandaran dalam pemberdayaan dan pembangunan. Oleh sebab itu, Islamic Relief juga merumuskan bahwa pembangunan haruslah dimulai dari dalam (*change comes from within*) meliputi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Adapun pembangunan dapat berjalan dengan adanya hubungan integrasi yang meliputi: integrasi institusional, sektoral, kawasan, kebijakan, lembaga keagamaan, dan integrasi antara hak dan kewajiban. Keberlanjutan pembangunan diarahkan pada keberlanjutan (*sustainability*) tatanan kehidupan masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan teknis. Secara keseluruhan, kerangka pembangunan berkelanjutan terintegrasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Perencanaan pembangunan daerah, merujuk pada teori di atas, dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan kedua teori yang telah dijelaskan. Paradigma perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber utama untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar dan tujuan pembangunan dalam perspektif qurani. Kemudian, kedua hal tersebut dijadikan landasan untuk memahami pembangunan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam konteks kearifan lokal (*local wisdom*) di suatu daerah. Selanjutnya, hasil pemahaman tersebut direkonstruksi berdasarkan pada tiga domain dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, yaitu: asset,

³¹ *Ibid.* hal., 6



faktor struktural dan ketahanan terhadap resiko.

Kesimpulan

Persoalan pembangunan daerah, dari masa ke masa, terlalu memberikan perhatian pada aspek politik, yaitu pembagian kekuasaan dan perimbangan anggaran. Jalan lain untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di daerah adalah dengan membentuk perangkat paradigma perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam dan khazanah lokal di setiap daerah. Ekonomi Islam menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai *metaframework* dan *archetypal model*; untuk kemudian disintesiskan dengan tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, dan dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di setiap daerah.

Daftar Pustaka

- A Prasetyantoko, dkk (ed.), *Pembangunan Inklusif Prospek dan Tantangan di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2012
- Abduh, Muhamad, dan Mohd Azmi Omar. "Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 1 (30 Maret 2012): 35–47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>.
- Arief, Sritua, & Adi Sasono, *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*, edisi revisi, Jakarta : Mizan, 2013
- Askari, Hossein, "Economic Development in Islam," dalam Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor (ed), *Economic Development and Islamic Finance*, Woshington DC : The World Bank, 2013
- Auda, Jasser, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London : IIT, 2007
- Bell, Daniel dan Irvin Kristol, (Ed.), *Krisis Teori Ekonomi*, terj. Jakarta : LP3ES, 1987
- Biddle, Karen Golden & Karen D. Locke, *Composing Qualitative Research*, California : Sage Publication, 2007
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : Gramedia, 2000
- Chapra, "Ibn Khaldun's Theory of Development : Does it Help Explain the Low Performance of the Present-day Muslim World?," *The Journal of Socio-Economics*, No. 37, 2008
- Chapra, *Islam and Economic Development*, Pakistan : IIT Islamabad, 1993
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, terj. Jakarta : Shariah Economics and Banking Institute, 2001
- Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*, London : IIT, 2008
- Dariah, Atih Rohaeti, dkk., "Development Planning in Islamic Perspective : New Structure Based on Indonesia Experience," *International Proceedings of Economics Development and Research*, Singapore: IACSIT Press. 2014
- Eppler, Erhard, *Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal*, terj. Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009
- Fakih, Mansour, *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*, Cet. Ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Ginting, Ramlan, dkk. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Likuiditas Rupiah: Operasi Moneter, Operasi Moneter Syariah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah*,



- Bank Indonesia : Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2013
- Gunawan, Jamil, dkk. (ed), *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, Jakarta : LP3ES, 2004
- Harvey, David, *A Brief History of Neoliberalism*, New York : Oxford University Press, 2005
- Hasan, Zubair, "Economic Development in Islamic Perspective: Concept, Objectives and Some Issues," *Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 6, 1995
- Hasan, Zubair, "Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning Implications and Policy Concerns," *Islamic Economics*, Vol. 19, No. 1, 2006
- Hatta, Mohammad, *Ekonomi Berentjana*, Jakarta : Gunung Agung, 1971
- Ismail, Abd. Ghafar B., dan Muhammad Zilal Hamzah, "Fiscal Decentralization and Economic Growth Nexus :Evidence from Province-Level Cross-Section Data for Indonesia," *Review of Islamic Economics*, Vol. 10, No. 2, 2006
- Kuncoro, Mudrajad, "Desentralisasi Sekedar Alat," pengantar buku Jamil Gunawan, dkk. (ed), *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, Jakarta : LP3ES, 2004
- Leksono, Sony, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*, Jakarta : Rajawali Press, 2013
- Liddle, R. William. "The Politics of Ekonomi Pancasila: Some Reflections on a Recent Debate." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 18, no. 1 (Maret 1982): 96–101. <https://doi.org/10.1080/00074918212331334130>.
- Lorenzo Fioramonti. *Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi*. terj. Jakarta: Margin Kiri, 2017.
- McCawley, Peter. "The Economics of Ekonomi Pancasila." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 18, no. 1 (1 Maret 1982): 102–9. <https://doi.org/10.1080/00074918212331334140>.
- Mirakhor, Abbas, dan Hossein Askari, *Islam and the Path to Human and Economic Development*, New York : Palgrave Macmillan, 2010
- Mohd. Yusof, Rosylin, dan Mejda Bahlous. "Islamic banking and economic growth in GCC & East Asia countries: A panel cointegration analysis." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 4, no. 2 (23 September 2013): 151–72. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2012-0044>.
- Mubyarto, "Krisis Ilmu Ekonomi Indonesia," A.B. Lopian, dkk., *Sejarah dan Dialog Peradaban Persembahan 70 Tahun Prof. Dr. Taufik Abdullah*, Jakarta : LIPI Press, 2005
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1988
- Mubyarto, *Teknokrat dan Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta : Adiya Media, 2004
- N. Zaman, "Sustainable Islamic Development: Recognizing the Primacy of Trust, Iman and Institution," *International Journal of Economics, Management, and Accounting*, Vol. 21, No. 1, 2013
- Noor, Isran, *Politik Ekonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*, Jakarta : Seven Strategic Studies, 2012
- Oey, Mayling, dan Peter Gardiner, "Lepas Landas Ekonomi dan Kesenjangan Regional: Pembangunan di Luar Jawa," *Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*, Nomor 3, Tahun 1990
- Ormerod, Paul, *The Death of Economics*, London : Faber and Faber, 1994



- Piketty, Thomas, *Capital in the Twenty-First Century*, translated by A. Goldhamer, Cambridge : Harvard University Press, 2014
- Rahardjo, M. Dawam, *Pembangunan Pascamodernis Esai-esai Ekonomi Politik*, Yogyakarta : Insist Press, 2012
- Rais, Mohammad Amien, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!*, Yogyakarta : PPSK, 2008
- Rizky, Awalil & Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkram Indonesia*, Jakarta : E. Publishing, 2008
- Salleh, Muhammad Syukri, "Philosophical Foundations of Islamic Development : Khursid Ahmad's Conceptions Revisited," *International of Education and Research*, Vol. 1, No. 7, Juli 2013
- Sardar, Ziauddin, *Kembali ke Masa Depan; Syari'at sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, terj., Jakarta : Serambi, 2005
- Sasana, Hadi, "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah," *Dinamika Pembangunan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2006
- Shaikh, Salman Ahmed. "Zakat Collectible in OIC Countries for Poverty Alleviation: A Primer on Empirical Estimation." *INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT* 1, no. 1 (22 November 2016): 17–35.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
- Trijono, Lambang, dkk (ed), *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*, Yogyakarta : Center for Security and Peace Studies (CSPS UGM), 2004
- Wahid, Nusron, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta : KPG, 2014
- Wibowo, Puji, "Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah," *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2008
- Zaman, Asad, "Crisis in Islamic Economics; Diagnosis and Prescription," *Presented in 8th International Islamic Economics Conference*, 11 Januari 2010